

Judul : Lagu Setuju Masih Bergema di Parlemen
Tanggal : Jumat, 22 Mei 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Lagu Setuju Masih Bergema di Parlemen

Reformasi pada 1998 melahirkan parlemen yang kuat mengawasi kekuasaan. Namun, kini, kritik di Senayan justru kian kehilangan gema.

**Machradin Wahyudi
Ritonga dan
Nikolaus Harbowo**

"Wakil rakyat seharusnya membela rakyat. Bukan wakil rakyat yang hanya sibuk dengan urusan politik. Wakil rakyat bukan paku-paku yang hanya menyalakan lagu setuju."

Pengalangan lirik lagu Iwan Fals berjudul "Sonal Buat Wakil Rakyat" yang dirilis pada 1987 itu menggambarkan betapa surut potret wakil rakyat di masa Orde Baru. Nyaris tak ada suara yang bangkit dari parlemen yang beranar mendiskusikan kebijakan pemerintahan Presiden Soeharto.

Sepanjang Orde Baru, masyarakat konservatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dikuasai partai penguasa, yakni Golongan Karya (Golkar). Dua partai politik, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), hanya mendapatkan se bagian kecil kursi parlemen.

Kursi DPR periode 1992-1997, misalnya, dari 400 kursi DPR, sebanyak 282 kursi dikuasai Golkar. Adapun PPP hanya memiliki 62 kursi dan PDI 56 kursi. Begitu pula DPR hasil Pemilu 1997 dari 425 kursi DPR, Golkar menguasai 225 kursi, PPP 89 kursi, dan PDI hanya 11 kursi.

Intervensi penguasa terhadap pimpinan partai-partai politik ditengarai semakin membuat wakil rakyat sulit bersuara. Tidak sedikit pula elite partai yang juga berada dalam kendali penguasa.

Faktor lain, sistem pemilihan legislatif masih tidak langsung. Rakyat hanya memilih partai tanpa mengetahui sosok calon wakil rakyatnya. Akibatnya, para pembuni Senayan lebih berperan sebagai representasi elite partai yang "dikeluar" rezim. Suara parlemen tak ubahnya stempel yang sekadar mengesahkan tiap kebijakan yang keluar dari Istana.

Mengantik 28 tahun Reformasi, wajah wakil rakyat seperti kembali ke era Orde Baru. Meski reformasi 1998 telah mengubah sistem pemilihan legislatif menjadi langsung dipilih rakyat, suara publik kerap ditiadakan. Geliat penguasa yang menarik partai-partai di parlemen ke dalam koalisi tunggal berkontribusi pada melemahnya fungsi pengawasan DPR.

Gejala itu sebenarnya mulai terlihat kuat pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sesuai Pemilu 2019, hampir semua partai pe-

milik kursi di parlemen ditarik masuk ke dalam orbit kekuasaan. Partai-partai yang sebelumnya berada di luar pemerintahan perlahan bergabung di barisan koalisi pendukung Jokowi dengan menempatkan kadernya di kabinet.

Kulisi pemerintahan membengkak dan menjadi sangat dominan di DPR. Di titik itu, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Pada itu terulang pula era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Gerindra itu menandatangani mayoritas parpol yang menjadi lawannya di Pemilihan Presiden 2024. Akibat, tugh dari delapan parpol di parlemen jadi pendukung pemerintah.

PDI Perjuangan (PDI-P) menjadi satu-satunya parpol yang hingga kini berada di luar pemerintahan dan menjalankan peran sebagai penyeimbang. Sejumlah anggota PDI dari PDI-P memang kerap melontarkan kritik tajam dalam sejumlah kesempatan, antara PDI-P justru senda dengan pemerintah.

Posisi politik PDI-P ini berbeda dengan yang terlihat di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014). PDI-P yang saat itu juga berada di luar pemerintahan berani berbeda sikap saat pengambilan keputusan di DPR.

Fraksi PDI-P misalnya, menolak pengesahan RUU Pilkada yang mengeliminasi sistem pilkada ke DPRD. PDI-P juga berulung kali mengkritik kebijakan fiskal pemerintahan Yudhoyono.

Dengan kondisi saat ini, masyarakat parpol mendukung pemerintahan Prabowo plus sikap gungam PDI-P sejumlah agenda strategi pemerintah pun berjalan relatif mulus. Begitu pula dengan pemusatan sejumlah produk perundang-undangan. Semua berjalan mulus meski publik kerap menentang kebijakan atau produk perundang-undangan yang disusun.

Ironisnya, kamar sebelah, yakni Komisi Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), yang lahir pasca-reformasi dan diharapkan

menjadi penyeimbang DPR justru makin kehilangan tajarnya. Saat ini transfer ke daerah dipangkas, misalnya, DPD hampir tak terdengar suaranya. Padahal, DPD dibentuk untuk memperkuat representasi daerah.

Kemandekan penyalaran aspirasi publik di parlemen ini perlahan memicu kekecewaan publik. Jarak antara suara rakyat dan sikap elite politik yang nyaris tak lagi tereliminasi dalam perdebatan di DPR membuat lembaga ini dipandang semakin jauh dari fungsi representasinya.

Puncaknya, gelombang demonstrasi pada Agustus 2025 menjadi catatan penting bagaimana rakyat tidak hanya pasrah dengan sikap elit parlemen terhadap kebijakan pemerintahan dan abai terhadap suara rakyat, tetapi juga anak dengan perilaku anggota DPR yang dinilai tidak peka terhadap penderitaan rakyat.

Dibutuhkan pengawasan

Kontrol kuat dari parlemen sebenarnya dibutuhkan Presiden Prabowo. Ini terjadi di Sunda Kalera dalam pilkada pada Rapat Paripurna DPR, Rabu (20/5/2026). Badi Prabowo, demokrasi membutuhkan checks and balances. Hal itu pun diulangnya mulai dibagikan dengan baik oleh PDI-P.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Daseki Ahmad mengemukakan, semua wakil reformasi 1998 tetap di-

jadi di parlemen. Menurut dia, DPR kini menjadi semakin terbuka untuk mendengarkan kritik dan masukan publik. Fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah pun tetap dijalankan oleh ahli kelompok DPR ataupun fraksi-fraksi di parlemen.

Anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Aria Hanu, mengatakan, parlemen tetap mempertahankan kekuatan kritis yang eksis. Partai pemerintah mungkin kuat untuk menjaga stabilitas. Tetapi partai di luar pemerintahan harus mampu memberikan kritik yang benar-benar membunyikan suara-suara alternatif untuk kepentingan rakyat.

Hal inilah yang seharusnya dipertegas teguh di era Reformasi. Meski demikian, Lutfi Aria, PDI-P dalam menjalankan peran sebagai penyeimbang tidak lantas mengkritisi semua kebijakan pemerintah. Kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat tetap didukung.

Sementara itu, anggota DPRD dari Teras Narang, mengukuti, peran DPRD belum optimal



Suasana Rapat Paripurna DPR yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

menyampaikan suara masyarakat di daerah. Masih terbatasnya kewenangan DPD jadi kendala utama. Dalam sistem legislasi, DPD tidak memiliki hak untuk mengajukan undang-undang, usul yang diadukan serta memberikan usul serta pertimbangan. Karena itu, ia mendorong penguatan kerja sama DPR selaku wakil rakyat dan DPD selaku wakil daerah.

Proses sembrono

Direktur Langgar Madani untuk Indonesia Ray Bangkarti mengatakan, kondisi parlemen saat ini mengancam pada DPR di era Orde Baru. "Dulu ada istilah anggota DPR SD-

datang, duduk, dengar, diam, dapat duit. Ini kurang lebih kembali terjadi saat ini," ujarnya.

Situasi tersebut, menurut Ray, terjadi karena beberapa faktor yang saling berkaitan. Salah satunya proses rekrutmen calon anggota legislatif (calong) yang dinilai sembrono dan bahkan tanpa kriteria. Hanya dengan ukuran utama popularitas dan modal, seseorang bisa menjadi calong.

Selain itu, praktik nepotisme semakin merajalela. Tidak hanya di tingkat nasional, praktik itu juga berlaku pada tingkat legislatif di daerah. Para wakil rakyat yang terpilih

dengan mengandalkan nepotisme ini umumnya kurang memahami standar etik dan filosofi anggota legislatif.

Kondisi kondisi itu melahirkan anggota DPR yang lebih takut pada partai daripada rakyat. Ketika partai itu memutuskan mendukung pemerintahan, para wakil rakyat pun terlibat sebagai perwujudan tangan pemerintah.

"Kalau partai mendarat ke koalisi pemerintah, mereka maut saja. Kalaupun ada se-

sekal ahli rapat-capat yang terlihat keras di komisi. Tapi, rasanya itu tidak akan me-na-mana," kata Ray. Ia menambahkan, satu-satu-

nya jalan untuk memperbaiki situasi ini adalah dengan mereformasi total legislasi. Ben-tuk, wewenang, dan keang-gutan DPR mendesak untuk di-desain ulang.

Reformasi legislatif ini juga menyangkut penguatan peran DPD. Menurut Ray, posisi DPD harus diperkuat.

Jika semua ini tidak diperbaiki, keragaman DPR dan DPRD sebagai perwakilan rakyat di bidang legislatif akan sulit mencapai titik idealnya. Impi-an reformasi yang mengizinkan pengawasan kekuasaan oleh para "wakil rakyat" ini pun dipudarkan oleh "nyanyi-an lagu setuju".

